
ANALISIS KAPASITAS PEMERINTAH DESA MEKARWANGI DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA

Gian Anggraeni Andriyanto¹, Anggara Satria Pamungkas²

Universitas Swadaya Gunung Jati¹, Universitas Islam Syekh Yusuf²

Email: anggrainigian@gmail.com

Abstrak

Desa Mekarwangi sebagai salah satu desa di Bandung Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah untuk dikembangkan sebagai agrowisata. Kapasitas pemerintah desa sangat penting dalam transformasi Desa Mekarwangi untuk menerapkan agrowisata. Kapasitas pemerintah desa kunci dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan desa. Tujuan penelitian untuk menganalisis kapasitas pemerintah desa, dan kendala dalam pengembangan agrowisata di Desa Mekarwangi. Penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dari data primer yang didapat melalui wawancara, dan observasi lapangan, serta data sekunder diperoleh dari data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen profil desa, literatur dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ditemukan kapasitas pemerintah desa masih memerlukan peningkatan di beberapa aspek penting, seperti aspek kemampuan dasar, kemampuan manajemen, dan kemampuan teknis. Perangkat desa Mekarwangi memiliki kapasitas dasar yang perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan dan bimbingan lebih lanjut, serta perbaikan dalam manajemen anggaran, koordinasi antar Lembaga, dan pengelolaan sumber daya untuk mendukung pengembangan agrowisata secara berkelanjutan. Ditemukan kendala yang menjadi penghambat pengembangan agrowisata maupun kapasitas perangkat desa, seperti fasilitas yang tidak memadai, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, dan terbatasnya anggaran desa.

Kata kunci: *Kapasitas, Perangkat Desa, Pemerintah Desa, Agrowisata*

PENDAHULUAN

Kemampuan sumber daya pemerintah desa merupakan factor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang adil dan rata di tingkat desa. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kapasitas sumber daya pemerintah desa itu sendiri. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur mengenai pengembangan kapasitas pemerintahan desa, yang mencakup beberapa aspek utama, yaitu: (1) kebijakan pemerintahan desa, (2) perencanaan pembangunan desa, (3) pengelolaan keuangan desa dan (4) kebijakan penyusunan peraturan di desa (Aminah & Sutanto, 2018). Dengan adanya pengakuan tersebut, desa harus siap dalam berbagai hal terutama dalam mempersiapkan kapasitas pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat pemerintahan desa dan sebagai pelayan publik, yang senantiasa menerapkan prinsip keadilan, kenyamanan serta efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini tentunya bisa diwujudkan dengan adanya kapasitas pemerintahan desa (Krisjuyani et al., 2023).

Setiap instansi pemerintah dalam kegiatan operasinya menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Bagaimana memanfaatkan salah satu sumber daya yang paling dominannya itu sumberdaya manusia, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan (Manahlu, et.al., 2019). Persoalan-persoalan pemerintahan desa selama ini belum memiliki kemampuan memadai dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan, yaitu: (1) manajemen perencanaan pembangunan desa, (2) manajemen administrasi desa dan (3) manajemen pengelolaan keuangan pemerintah desa (Noor, Firdaus, & Yopiannor, 2019). Pembangunan desa mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, sebabnya kapasitas pemerintah desa dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perencanaan pembangunan agar dapat berhasil dengan baik atau dengan kata lain keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan desa sangat ditentukan oleh terwujudnya pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna mulai dari proses

penggalan masalah, penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalannya secara berkelanjutan (Dhue & Tokan, 2021).

Kapasitas pemerintah desa yang berkualitas akan menentukan keberhasilan desa untuk mengelola pemerintahan desa dari berbagai bidang maupun pengelolaan sumber daya alamnya. Kapasitas perangkat pemerintah berkaitan erat dengan kinerja pemerintah, karena berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan akan dinilai dari kinerja perangkatpemerintah dengan komposisi kapasitas personel dalam organisasi tersebut (Budi Utama, Bayu Prewito, Pratikno, Udianto Kurniadi, & Khairul Rahmat, 2020). Pemerintah desa dituntut untuk kreatif, inovatif dan mampu merespon kebutuhan publik salah satunya dengan mengelola potensi dari sumber daya alam yang dimiliki desa. Segala sumber daya yang ada di perdesaan menjadi peluang agar, masyarakat lebih berdaya dengan adanya dukungan dari Pemerintah Desa sebagai penyelenggara dari Pemerintahan Desa (Wardani et al., 2020). Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi daerahnya secara mandiri termasuk mengelola sektor pariwisata (Damayanti, 2014). Otonomi desa yang berarti juga kekuatan hukum yang dimiliki suatu desa untuk dapat melakukan beberapa tindakan hukum salah satunya adalah memiliki harta benda dan kekayaan sendiri (Kushartono, Rohayatin, Kurnia, Wulandari, & Munawaroh, 2022). Melalui UU Desa tersebut, keberadaan pemerintah desa sebagai bagian dari struktur pemerintah semakin diakui sebagai pemerintah desa yang mandiri dan berhak mengelola potensi yang dimiliki masing-masing pemerintah desa (Sulismadi & Muslimin, 2017).

Desa Mekarwangi menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi sumber daya alamnya yang melimpah dari hasil perkebunan, pertanian, kehutanan berupa teh, kopi, madu, dan sayuran. Desa Mekarwangi terkenal dengan perkebunan teh hijau dengan luas mencapai 480 hektare. Desa

Mekarwangi sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan agri berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan kawasan wisata agri berdasarkan Detail Engineering Design Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi agri yang dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata agri (Julian Par et al., 2022). Hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah salah satunya kopi organik Gunung Halu yang mendapatkan dua kali penghargaan dunia. Selain itu, Desa Mekarwangi menjadi salah satu lokasi perkebunan teh masyarakat terbesar di Jawa Barat yang telah menyumbang produksi teh di Jawa Barat terbesar di Indonesia (Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2020). Peran pemerintah desa sangat penting dalam pengembangan agrowisata di Desa Mekarwangi yang didukung juga dengan kapasitas sumber daya perangkatpemerintah desa karena pengembangan agrowisata untuk mendapatkan hasil yang optimal harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai (Wahyudi & Yahya, 2021).

Perencanaan dan upaya pengembangan Desa Mekarwangi sebagai desa agrowisata telah berlangsung selama 4 tahun namun kemajuan yang didapatkan belum optimal hingga sekarang. Upaya pengembangan potensi sumber daya alam Desa Mekarwangi telah dilakukan pada tahun 2020 pada kegiatan pengabdian masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Pengembangan yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi (P3MI), Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan (PWD) Sekolah Arsitektur Pengembangan Kebijakan Perencanaan (SAPPK) Institute Teknologi Bandung (Rosyidie dkk, 2021). Kepala desa saat ini telah berupaya dalam memimpin inisiasi kerjasama untuk memajukan Desa Mekarwangi sebagai destinasi wisata namun juga belum optimal.

Salah satu kendala belum optimalnya kemajuan pengembangan wisata Desa Mekarwangi adalah dari peran kapasitas perangkatdesa yang sangat krusial dalam pengembangan Desa Mekarwangi sebagai agrowisata. Belum optimalnya kemajuan wisata ini mencerminkan keterbatasan dalam pengetahuan, manajemen, dan

keterampilan teknis yang dimiliki perangkatdesa. Meskipun Kepala Desa telah berupaya memimpin inisiatif kerja sama untuk memajukan agrowisata Desa Mekarwangi, namun keterbatasan kapasitas perangkatdesa ini mengambat perencanaan strategis, implementasi kebijakan, dan koordinasi dengan pihak eksternal.

Cakupan dimensi peningkatan kapasitas perangkatdesa berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperoleh dari pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman. Sedangkan tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkatdesa yaitu: 1) kemampuan dasar; 2) kemampuan manajemen; 3) kemampuan teknis. Untuk kemampuan teknis yang harus dimiliki perangkatdesa meliputi; pengetahuan tentang regulasi desa, dasar – dasar pemerintah desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Sedangkan untuk kemampuan manajemen diantaranya; manajemen asset, dan keuangan. Lalu kemampuan teknis seperti; penyusunan administrasi desa, perencanaan, Pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan Perdes dan pelayanan publik (Asrori, 2014).

Peran kapasitas pemerintah desa baik secara individu maupun kelembagaan desa sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pembangunan desa. Pemerintah desa memiliki hak otonomo untuk mengelola desanya sendiri dengan memanfaatkan hasil sumber daya alam desanya. Untuk membuktikan peran pemerintah desa, beberapa penelitian yang telah mengkaji mengenai peran pemerintah desa ini berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki perangkatpemerintah desa itu sendiri. Penelitian oleh (Setiawan, Wulandari, & Munawaroh, 2024) ditemukan bahwa pengembangan wisata di Desa Cimanggu belum optimal karena kapasitas pemerintah desa masih terbatas dalam hal reformasi regulasi, kelembagaan serta kurangnya komitmen. Sementara, penelitian lain oleh (Sumaryana, Muhafidin, & Suprayogi Sugandi, 2019) menunjukkan aspek penting seperti human resources, dukungan luar (eksternal), infrastruktur, dan keuangan di dalam organisasi desa belum mampu memajukan ssektor wisata karena kapasitas

organisasi belum cukup berkualitas untuk pengembangan pariwisata secara efektif. Kapasitas yang dimiliki pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan ataupun program-program desa.

Pemerintah desa yang memiliki kapasitas yang berkualitas, akan mencapai keberhasilan pembangunan desa yang akan menginisiasi pemerintah desa untuk tanggap dan mampu beradaptasi dengan teknologi maupun kerjasama antar sektor. Seperti keberhasilan pengembangan wisata di desa dataran tinggi Dieng, kemampuan pemerintah desa menanggapi fenomena dengan membuat suatu program PNPM Mandiri Pariwisata (Prabawati & Putri, 2013). Penelitian lain dari kapasitas pemerintah desa yang memadai, Desa Adat Kemiren berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wisata alam (Wanda Febrian et al., 2023). Dukungan Undang-Undang Desa memberikan angin segar bagi pemerintah desa dalam mengelola potensi desa sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai (Sopyan, Nursetiawan, & Garis, 2024). Peranan pemerintah yang aktif inilah menjadi salah kerangka dalam membangun desa yang masyarakatnya sendiri sejahtera (Warisi, Trisno Aji, & Aprilia, 2024).

Dari permasalahan di atas, maka sangat diperlukan kapasitas pemerintah Desa Mekarwangi dalam upaya pengembangan agrowisata yang lebih optimal di Desa Mekarwangi. Pengembangan agrowisata Desa Mekarwangi yang lebih optimal sangat penting untuk memaksimalkan potensi lokal yang dapat meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru terutama pada sektor pertanian dan pariwisata. Pentingnya penelitian kapasitas pemerintah desa dalam upaya mengoptimalkan pengembangan agrowisata Desa Mekarwangi. Maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis kapasitas pemerintah desa, dan kendala dalam pengembangan agrowisata di Desa Mekarwangi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan guna menggali informasi secara akurat. Untuk deskriptif, peneliti gunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata dan data dalam bentuk table atau gambar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kapasitas pemerintah desa, dan kendala dalam pengembangan agrowisata Desa Mekarwangi dalam bentuk deskriptif. Penentuan lokasi dilakukan secara *purposive* di Kabupaten Bandung Barat tepatnya Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta, dengan pertimbangan: pemilihan lokasi dilihat dari potensi alam dan sumber daya pertanian, pembangunan dan pengembangan pariwisata yang masih kurang memadai, infrastruktur yang terbatas dan karena konteks sosial ekonomi yang unik.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun melalui wawancara dengan kepala Desa Mekarwangi dan observasi di lapangan mengenai kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana, serta potensi agrowisata di Desa Mekarwangi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data statistic dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen profil desa, literatur dari penelitian sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) studi literatur (untuk mendukung penelitian dari teori, definisi, konsep, dan indicator-indikator yang digunakan). (2) Observasi lapangan (untuk mendapatkan data gambaran wilayah dan kondisi pemerintahan desa sebagai lokasi penelitian) dan (3) wawancara langsung dengan Kepala Desa (untuk kondisi kapasitas perangkat desa dan kendala yang dihadapi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kapasitas Perangkat Desa

Pemerintah desa memainkan peran kunci dalam pembangunan di tingkat lokal, terutama dalam penyediaan layanan dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya lokal. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam

merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang selaras dengan kebutuhan potensi desa. Perangkatdesa yang berkapasitas baik mampu merumuskan kebijakan yang efektif, melaksanakan program-program pemerintah desa, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk mencapai tujuan yang direncanakan, pemerintah desa harus terus meningkatkan kompetensinya untuk meningkatkan kapasitas individual maupun organisasi guna mendukung tkesejagteraan dan meningkatkan kekuatan potensi yang ada di masyarakat sehingga masyarakat desa menjadi mandiri dan sejahtera.

Profil Perangkat Desa

Tabel.1 Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Mekarwangi Kabupaten Bandung Barat

Jabatan	Tingkat Pendidikan
Kepala Desa/Lurah	SLTA
Sekretaris Desa	SLTA
Kepala Urusan Pemerintahan	SLTA
Kepala Urusan Pembangunan	SLTA
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	SLTA
Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat	SLTA
Kepala Urusan Umum	SLTA
Kepala Urusan Keuangan	SLTA

Sumber: Profil Desa Mekarwangi

Tingkat pendidikan perangkat Desa Mekarwangi memiliki tingkat pendidikan yang seragam, yaitu SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal yang dimiliki oleh perangkat desa berada pada level menengah. Meskipun SLTA dapat memberikan dasar keterampilan administrasi dan manajemen, tingkat pendidikan SLTA belum sepenuhnya memadai untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam tata kelola pemerintahan desa, seperti pengelolaan anggaran, perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat

yang efektif. Keseragaman tingkat pendidikan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas perangkatdesa melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan.

1. Aspek Individu

Kapasitas perangkat desa merujuk pada kompetensi personal yang dimiliki oleh setiap individu dalam menjalankan tugasnya. Dalam peningkatan kapasitas apatur desa, mencakup beberapa dimensi kunci yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja perangkatdesa meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktis. Dalam penelitian ini, analisis kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa mencakup; 1) Kemampuan dasar, yang meliputi pengetahuan regulasi desa, dan pengetahuan tugas pokok dan fungsi; 2) Kemampuan manajemen, mencakup; manajemen SDM, manajemen asset dan keuangan 3) Kemampuan teknis, mencakup: penyusunan administrasi desa, dan perencanaan pembangunan.

a. Kemampuan Dasar

Kemampuan dasar yang di analisis dalam penelitian ini merujuk pada kompetensi dasar yang dimiliki perangkat desa mencakup aspek regulasi dan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa. Didapatkan bahwa mayoritas perangkat desa lulusan SLTA, menunjukkan bahwa pendidikan formal yang dimiliki oleh perangkat desa berada pada level menengah. Ditemukan bahwa kapasitas perangkat pemerintah Desa Mekarwangi dalam pengembangan agrowisata memiliki kekuatan dalam pemahaman regulasi. Pemerintah desa mekarwangi telah membuat regulasi mengenai pengembangan pariwisata desa, dimana peraturan mengenai pengembangan pariwisata ini sangat berpengaruh pada kegiatan yang akan dilakukan kedepannya untuk memberikan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk mengembangkan agrowisata Desa Mekarwangi.

Aspek regulasi ini sangat diperlukan upaya percepatan pengembangan pariwisata dan pembangunan desa sehingga terwujudnya aspek pelayanan dalam pengembangan dan mengelola potensi desa. Umumnya perangkat desa sudah memahami tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa yang diatur dalam regulasi terkait agrowisata. Namun, meskipun ada pemahaman tentang sebagian peraturan, perangkat desa masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut dalam aspek implementasi yang lebih praktis. Ini menunjukkan adanya kesenjangan secara teoritis dengan kemampuan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dibutuhkan peningkatan kapasitas perangkat desa sebagai fokus utama yang bisa dilakukan agar lebih optimal dalam implementasi yang lebih efektif. Merujuk pada peraturan penting yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata menjadi rekomendasi untuk acuan bagi Pemerintah Desa Mekarwangi dalam membuat regulasi pengembangan pariwisata desa. Upaya perencanaan pengembangan agrowisata yang telah dilakukan pada tahun 2021 bersama stakeholder perlu diprioritaskan ke dalam regulasi dan praktik pembangunan desa. Sehingga pemerintah kabupaten dan kota dapat melaksanakan program Pembangunan kepariwisataan dan menjadikannya dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Barat.

Sedangkan terkait aspek tugas pokok dan fungsi pemerintah desa, perangkat Desa Mekarwangi memiliki pemahaman tentang peran mereka dalam pengelolaan sumber daya desa untuk tujuan pariwisata dan agrowisata, namun pemahaman ini belum diikuti dengan tindakan yang optimal. Meskipun perangkat desa menyadari pengelolaan sumber daya desa menjadi bagian dari tanggung jawab mereka, namun dalam implementasinya perangkat desa masih perlu ditingkatkan dan pendampingan untuk hasil yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu,

perangkat desa juga memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan postensi agrowisata Desa Mekarwangi. Pemerintah Desa Mekarwangi telah menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder sebagai langkah untuk pengembangan agrowisata desa yaitu dengan Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi (P3MI), Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan (PWD) Sekolah Arsitektur Pengembangan Kebijakan Perencanaan (SAPPK) Institute Teknologi Bandung.

Meskipun demikian, perangkat desa memiliki gagasan dasar, tetapi masih membutuhkan pendampingan ataupun panduan teknis yang lebih jelas dan detail. Ini menunjukkan walaupun ada kesadaran dan pengetahuan dasar, tetapi kurangnya pendampingan, pelatihan keterampilan, dan arahan menjadi kendala dalam memaksimalkan potensi agrowisata Desa Mekarwangi. Kerjasama sebelumnya telah berhasil mengidentifikasi potensi daya tarik wisata, terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), terbentuknya rintisan Kampung Ganyol, tersusunnya paket wisata desa agrowisata Mekarwangi, dan terciptanya *agrohometstay*.

Untuk pengetahuan terhadap tugas pokok dan fungsi, Pemerintah Desa Mekarwangi sebagai pelayanan publik dalam pengembangan agrowisata sangat krusial dan cukup memahami. Untuk mendukung keberhasilan pengembangan agrowisata, pemerintah desa mekarwangi telah berperan lebih aktif untuk menginisiasi, mendukung, dan memfasilitasi program-program pengembangan pariwisata, seperti pembentukan pokdarwis, dan pelatihan desa wisata. Dapat dikatakan bahwa kapasitas perangkat desa sebagai kemampuan seseorang dilihat dari tingkat pendidikan perangkat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya (Bachtiar et al., 2019). Pengetahuan perangkat desa mengenai tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat perlu diperkuat melalui pelatihan pengembangan pariwisata desa dan pelatihan manajemen pelayanan publik.

b. Kemampuan Manajemen

Perangkat desa harus memiliki kemampuan manajemen yang baik sebagai unsur dalam kapasitas pemerintah desa untuk pengelolaan sumber daya perangkat desa maupun sebagai pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan aset, dan pengelolaan anggaran. Hal ini untuk menjamin manajemen pelayanan publik khususnya dalam pengembangan agrowisata, dan pengelolaan sumber daya alam.

Dari hasil penelitian, diperoleh terkait kemampuan manajemen perangkat desa Mekarwangi dalam mengelola aset desa untuk pengembangan agrowisata, didapatkan bahwa pengelolaan aset desa seperti potensi pertanian hortikutura, perkebunan, teh, kopi, dan sayuran-sayuran masih belum optimal. Sumber daya alam yang ada ini menjadi potensial sebagai daya tarik dalam pengembangan agrowisata. Upaya dalam pengelolaan aset desa telah dipertegas dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa menjadi rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa (Martina et al., 2017). Namun, potensi yang ada ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh perangkat desa karena manajemen aset perangkat desa masih membutuhkan peningkatan, terutama dalam hal perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Keterbatasan perangkat desa dalam pengelolaan aset karena kurangnya strategi perencanaan, koordinasi antar pihak terkait, serta pemanfaatan yang belum terarah terhadap sumber daya yang ada.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam pengelolaan fasilitas yang mendukung wisata, seperti kawasan wisata atau infrastruktur tertunda.

Ini menunjukkan pemerintah desa dalam mengelola aset desa masih terbatas dan memerlukan penguatan, baik dalam hal teknis pengelolaan maupun koordinasi antar stakeholder. Sementara itu, untuk kapasitas perangkat Desa Mekarwangi dalam menyusun anggaran untuk mendukung pengembangan agrowisata dapat dikatakan masih terbatas. Perangkat desa memahami pentingnya anggaran dalam pengembangan agrowisata, namun terdapat kendala yang menjadi penghambat perangkat desa dalam menyusun rencana anggaran yang efektif dan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Perangkat desa belum sepenuhnya menguasai keterampilan yang dibutuhkan untuk merancang anggaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan agrowisata. Hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman dan pengetahuan teknis dalam perencanaan anggaran, terutama terkait proyek pembangunan pariwisata dan infrastruktur pendukung pariwisata. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan anggaran dan aset desa membutuhkan peningkatan lebih lanjut. Pada dasarnya perangkat desa mekarwangi telah mulai menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, namun pada implemmentasi pelaporan, penggunaan anggaran serta aset desa, tetapi praktik transparansi dan akuntabilitas ini belum sepenuhnya optimal.

Hal ini berarti mekanisme pelaporan dan pengawasan anggaran belum sepenuhnya efektif, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah dalam hal penggunaan sumber daya secara efisien dan transparan. Kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas ini membutuhkan perbaikan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan aset dilakukan dengan cara yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas menjadi kewajiban pemerintah untuk melaporkan kepada masyarakat tentang komitmen pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat (Gibran et al., 2021). Karena bisa saja

keterbatasan perangkat desa dalam pengelolaan anggaran maupun pengelolaan aset desa dikhawatirkan menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat terhadap alokasi dan penggunaan anggaran dalam pengembangan pariwisata.

Perangkat Desa Mekarwangi membutuhkan peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan jangka panjang, pemetaan potensi aset, serta koordinasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal. Perlu ada langkah strategi dalam peningkatan pengelolaan aset melalui pelatihan menyusun anggaran yang komperhensif dan strategis, perencanaan, dan peningkatan kolaborasi, sehingga pengembangan agrowisata dapat dioptimalkan dan berkelanjutan. Hal ini berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien dan yang diungkapkan (Asrori, 2014) bahwa mengacu pada kebutuhan-kebutuhan seperti penyesuaian kebijakan dan peraturan, adanya reformasi kelembagaan, modifikasi prosedur-prosedur kerja dan mekanismen koordinasi, peningkatan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia. Perubahan ini mencakup penerapan sistem nilai dan perilaku yang lebih responsive terhadap tuntutan demokratis, mendorong mekanisme partisipatif dalam pengelolaan pemerintahan.

c. Kemampuan Teknis

Selain dituntut untuk memiliki kemampuan dasar dan kemampuan manajemen yang baik, perangkat desa juga dituntut untuk memiliki kapasitas manajemen teknis. Kemampuan teknis ini menuntut perangkat desa untuk dapat terampil dalam menyusun dokumen-dokumen kelengkapan administrasi seperti penyusunan administrasi desa, dan

penyusunan perencanaan pembangunan dalam pengembangan pariwisata desa. Dalam hal pengembangan pariwisata desa, Pemerintah Desa Mekarwangi harus mampu menyusun dokumen administrasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa untuk pengembangan pariwisata dan agrowisata yang ada di Desa Mekarwangi. Di samping itu juga, perangkat desa harus mampu menyusun anggaran yang disesuaikan dengan regulasi mengenai penggunaan anggaran pengembangan pariwisata dengan transparan dan akuntabel.

Diketahui berdasarkan aspek penyusunan dokumen administrasi perangkat Desa Mekarwangi secara keseluruhan sudah mampu menyusun dokumen perencanaan seperti perencanaan pembangunan desa, tetapi masih membutuhkan pendampingan teknis dalam hal penyusunan yang lebih mendalam dan sesuai standar. Kapasitas perangkat desa pada aspek ini dikatakan cukup memadai. Meskipun demikian, kemampuan teknis perangkat desa dalam menyusun dokumen administrasi masih membutuhkan peningkatan melalui bimbingan teknis yang lebih intensif dan terarah. Peningkatan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen yang telah dibuat tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga dapat mendukung pelaksanaan program pengembangan pariwisata dan agrowisata yang efektif dan berkelanjutan. Perangkat desa dapat meningkatkan kemampuannya apabila ada pendampingan yang tepat dalam menyusun perencanaan yang lebih terstruktur, strategis, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa. Hal ini dijelaskan oleh Irawati bahwa kapasitas menjadi penguasaan pengetahuan dan informasi serta keterampilan dalam menerapkan instrumen kebijakan untuk menjalankan fungsi-fungsi secara efektif dan efisien (Irawati, 2021).

Untuk aspek pembangunan desa yang meliputi kemampuan perangkat desa dalam menyusun rencana kerja dan regulasi desa terkait

pengembangan pariwisata, perangkat desa cukup memumpuni. Perangkat desa mampu menyusun rencana kerja dan dokumen regulasi yang relevan dengan pengembangan pariwisata, termasuk agrowisata. Hanya saja dalam praktiknya, keterampilan dasar perangkat desa saja tidak cukup, terdapat kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pada beberapa aspek yaitu pada perencanaan yang detail, pemahaman terhadap regulasi yang lebih kompleks, serta integrasi rencana kerja dengan program-program pembangunan desa lainnya. Dapat dikatakan bahwa perangkat desa memiliki fondasi keterampilan teknis yang baik, tetapi kualitas dokumen perencanaan dan penyusunan regulasi dapat ditingkatkan lebih lanjut. Namun, dalam menyusun rencana pembangunan agrowisata, pelatihan yang dilakukan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan agrowisata secara optimal. Perangkat desa memang telah menerima beberapa bentuk pelatihan, tetapi tingkat pelatihan yang diadakan belum cukup memadai dal hal durasi, intensitas, dan cakupan materi. Pelatihan yang pernah diadakan belum secara khusus membekali perangkat desa dengan keterampilan teknis yang mendalam untuk menyusun rencana pembangunan.

Keterbatasan pelatihan yang diadakan, mempengaruhi kemampuan perangkat desa dalam menyusun rencana pembangunan yang komprehensif, mulai dari mengidentifikasi potensi desa hingga penyusunan strategi pembangunan yang terintegrasi. Ada resiko apabila rencana yang disusun tidak cukup spesifik, dapat menjadi tantangan bagi pemerintah Desa Mekarwangi. Desa tidak hanya berkewajiban Menyusun perencanaan pembangunan yang mengacu pada perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga harus mencakup program-program yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah yang menjadi kewajiban bagi desa yang akan disusun oleh pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Herdiana, 2020). Melalui UU No. 6 Tahun 2014, bahwa

diharapkan peningkatan kapasitas desa dapat tercapai, karena desa tidak lagi menjadi bagian dari lapisan administrative paling bawah maupun sekadar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah daerah. Dari analisis ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat desa telah menunjukkan keterampilan dalam menyusun dan membuat rencana kerja, dokumen regulasi, dan rencana pembangunan, peningkatan kapasitas dalam aspek teknis sangat dibutuhkan untuk memastikan dan memperkuat kapasitas manajemen teknis perangkat desa, diperlukan pelatihan yang lebih mendalam dan terfokus pada aspek-aspek penting seperti strategi perencanaan, pemetaan potensi, pemanfaatan teknologi dalam pariwisata, serta manajemen. Dengan begitu rencana yang disusun benar-benar efektif, realistis, dan dapat mendukung pengembangan agrowisata yang berkelanjutan.

2. Aspek Kelembagaan

Pemerintah Desa Mekarwangi seperti halnya dengan pemerintah desa lainnya, memiliki BPD sebagai kelembagaan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting sebagai lembaga desa dalam memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Walaupun anggota BPD Desa mekarwangi hanya beranggota 11 orang dengan berlatar belakang pendidikan SLTA, peran BPD dalam memberikan masukan kepada perangkat desa tetap krusial dan relevan. BPD sebagai kelembagaan desa, berkewajiban mendorong peningkatan kualitas kinerja perangkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, BPD sebagai lembaga desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan agrowisata hanya terlibat secara aktif dalam tahap perencanaan namun BPD tidak memainkan peran yang signifikan dalam pelaksanaan pengembangan agrowisata. Keterlibatan BPD pada tahap perencanaan menunjukkan bahwa BPD sebagai lembaga desa telah menjalankan fungsinya sebagai wakil masyarakat dalam memberikan

masuk, menyetujui, dan mengarahkan ikut perencanaan program agrowisata sebagai tujuan dari fungsi pengawasan dan representasi aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, peran BPD berhenti pada tahap perencanaan, tanpa melanjutkan implementasi program di lapangan.

Hal ini telah dijelaskan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menyebutkan bahwa diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa untuk tujuan pembangunan desa. Keterbatasan BPD disebabkan beberapa factor yaitu kurangnya kapasitas teknis BPD dalam hal pelaksanaan program atau peran yang diatur secara formal dalam struktur pemerintahan desa yang lebih fokus pada pengawasan daripada operasionalisasi yang menimbulkan kesenjangan antara perencanaan yang dirumuskan oleh BPD dan pelaksanaan di lapangan yang menjadi tanggung jawab perangkat desa lainnya. Untuk meningkatkan efektivitas program agrowisata, BPD tidak hanya terlibat dalam perencanaan, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program, sehingga peran BPD dalam pengembangan agrowisata Desa Mekarwangi bisa lebih menyeluruh.

Terkait pelatihan dan dukungan teknis yang diterima lembaga desa dalam pengembangan agrowisata, didapatkan bahwa lembaga desa belum mendapatkan pelatihan atau dukungan teknis yang memadai. Ini dikarenakan terbatasnya pelatihan khusus yang fokus pada aspek teknis pengembangan agrowisata, seperti strategi perencanaan, manajemen potensi lokal, pemasaran, dan keinginan pariwisata berbasis pertanian. Selain itu, dukungan teknis dari pihak eksternal seperti pemerintah daerah, akademisi, atau praktisi pariwisata juga belum optimal. Lembaga desa memahami pentingnya agrowisata untuk pengembangan ekonomi lokal, namun karena tidak adanya

bimbingan teknis yang memadai, implementasi program cenderung tidak maksimal dan kurang terarah.

Hal ini juga berkaitan dengan koodinasi antara kelembagaan desa dengan perangkat desa lainnya dalam menjalankan program pengembangan agrowisata masih kurang optimal dan sering mengalami kendala dalam pelaksanaan program. Kurang optimalnya koordinasi anantara kelembagaan dengan perangkat desa dikarenakan koordinasi yang kurang efektif, dan kendala dalam pelaksaan program agrowisata. Perangkat desa dan lembaga desa belum memiliki mekanismen koordinasi yang solid dan terstruktur dengan baik yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak lancar, dan kurangnya forum yang efektif untuk diskusi dalam pengembangan agrowisata secara berkelanjutan.

Perlunya perbaikan dalam koordinasi antar kelembagaan dan perangkat desa dengan penerapan system seperti rapat rutin, pembentukan tim kerja khusus, dan menggunakan alat komunikasi yang efisien akan dapat meningkatkan koordinasi.

3. Aspek Sarana dan Prasarana Kantor Desa

Kapasitas perangkat desa juga didukung dengan sarana dan prasarana kantor desa yang memadai. Sarana dan prasarana kantor desa memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan pemerintahan. Dari hasil penelitian didapatkan sarana dan prasarana peralatan kantor desa cukup memadai. Kemanfaatan peralatan kantor desa yang menunjang kemampuan/kapasitas perangkat desa Mekarwangi yang tersedia seperti peralatan teknologi informasi (computer/laptop, jaringan internet, dan printer), ruang kantor seperti ruang kerja kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya yang dilengkapi dengan meja, kursi, lemari arsip, dan computer, lalu terdapat ruang rapat atau aula serbaguna untuk pertemuan dan diskusi antar perangkat desa, masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya. Untuk

sarana dan prasarana kesehatan dan kendaraan operasional masih belum memadai, dikarenakan peralatan tersebut diperoleh dari pemerintah kabupaten dengan proses pengajuan kebutuhan yang membutuhkan waktu yang lama sehingga belum terealisasikan.

B. Kendala Pemerintah Desa Mekarwangi Dalam Pengembangan Agrowisata

Kapasitas perangkat desa dalam mengembangkan agrowisata memiliki kendala yang menjadi penghambat kemajuan agrowisata Desa Mekarwangi. Beberapa kendala yang menjadi penghambat pengembangan agrowisata Desa Mekarwangi diantaranya:

1. Fasilitas yang Tidak Memadai

Ditemukan bahwa salah satu kendala utama dalam pengembangan agrowisata yaitu fasilitas yang tidak memadai atau belum terintegrasi dengan baik. Pemerintah desa berupaya mengembangkan sektor agrowisata, dengan fasilitas pendukung yang diperlukan seperti infrastruktur fisik (jalan, sarana transportasi), perlengkapan kebutuhan agrowisata, ini namun belum tersedia dengan optimal. Keterbatasan fasilitas ini berdampak pada efisiensi operasional dan daya tarik wisata agrowisata. Tidak hanya fasilitas utama, namun fasilitas pendukung seperti toilet, area parker, atau tempat obadah belum terintegrasi dengan baik.

2. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan

Perangkat desa maupun staff desa memiliki pengetahuan dasar dalam pengembangan agrowisata, namun perangkat desa masih membutuhkan pelatihan tambahan, karena keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki perangkat desa belum cukup untuk menjalankan program pengembangan agrowisata yang secara efektif. Pengetahuan perangkat desa mencakup pengenalan konsep agrowisata, potensi lokal, dan pemahaman regulasi umum yang mengatur pengelolaan desa. Namun, pengetahuan ini belum didukung

dengan keterampilan teknis yang lebih mendalam, seperti kemampuan dalam merancang strategi pengembangan agrowisata, mengelola sumber daya alam dengan berkelanjutan, dan mengadopsi teknologi digital.

Keterbatasan ini menjadi penghambat implementasi pengembangan agrowisata karena perangkat desa belum memiliki keahlian yang cukup untuk mengelola, merencanakan, dan mengembangkan agrowisata secara strategis. Sehingga, perlu adanya peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan lanjutan yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek agrowisata, termasuk pemasaran digital, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan layanan wisata, dan pengelolaan anggaran desa.

3. Keterbatasan Anggaran atau Alokasi Dana Desa

Pemerintah Desa Mekarwangi memiliki sumber dana melalui dana desa, tetapi alokasi anggaran untuk pengembangan agrowisata masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan yang telah direncanakan seperti alokasi untuk pembangunan fasilitas, pelatihan sumber daya perangkat desa, dan promosi. Keterbatasan anggaran dikarenakan prioritas pemerintah desa yang lebih diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat yaitu peningkatan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur desa, sehingga pada pengembangan agrowisata belum mendapatkan perhatian yang cukup.

Keterbatasan lainnya, karena kemampuan perangkat desa dalam menyusun anggaran untuk pengembangan agrowisata masih kurang optimal, perangkat desa masih membutuhkan pendampingan ataupun pelatihan, sehingga dalam alokasi dana desa menjadi tidak proporsional terhadap kebutuhan pengembangan agrowisata. Adanya keterbatasan dana ini juga mempengaruhi pelaksanaan program pendukung lainnya untuk peningkatan kapasitas perangkat desa.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas erangkat desa Mekarwangi dalam pengembangan agrowisata masih membutuhkan peningkatan di beberapa aspek penting seperti pemahaman regulasi yang mengatur tugas pokok dan fungsi, meskipun perangkat desa memahami regulasi tersebut, namun perangkat desa masih membutuhkan bimbingan dalam implementasi regulasi agar lebih efektif. Kemudian untuk kemampuan manajemen, perangkat desa dalam mengelola aset desa untuk pengembangan agrowisata belum optimal, terutama dalam hal koordinasi dan manajemen sumber daya. Selain itu, kemampuan perangkat desa dalam penyusunan anggaran dan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran masih terbatas dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk mendukung program agrowisata yang berkelanjutan.

Untuk kemampuan teknis, perangkat desa cukup terampil dalam Menyusun rencana kerja dan dokumen regulasi terkait pengembangan pariwisata, namun tetap masih perlu peningkatan kualitas dalam beberapa aspek teknis. Sejauh ini pelatihan yang dilakukan belum mencukupi untuk menyusun rencana pembangunan pariwisata khususnya agrowisata. Aspek lainnya untuk kelembagaan juga perlu ditingkatkan koordinasi antar kelembagaan desa dan perangkat desa dalam implementasi pengembangan agrowisata karena masih belum optimal. Pemerintah desa Mekarwangi menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas yang tidak memadai dan belum terintegrasi dengan baik, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, dan terbatasnya anggaran desa menjadi kendala dalam pengembangan agrowisata dan kapasitas perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Sutanto, H. P. (2018). Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Di Kabupaten Bogor. *Matra Pembaruan*, 2(3), 149–160. Doi:10.21787/Mp.2.3.2018.149-160
- Arief, et., al. (2022). *Pengembangan Agrowisata untuk Mengoptimalkan Potensi Desa di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. www.onlinedoctranslator.com
- Bachtiar, B., Psikologi, J., Tinggi, S., & Psikologi, I. (N.D.). Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa.
- Budi Utama, D., Bayu Prewito, H., Pratikno, H., Udianto Kurniadi, Y., & Khairul Rahmat, H. (2020). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana 1. Doi:10.31604/Jips.V7i3.2020.598-606.
- Dhue, J. I. R., Tokan, F. B., Ilmu, P., Unika, P., Mandira, W., & Abstrak, K. (N.D.). *Penguatan Kapasitas Pemerintah Merencanakan Pembangunan Desa Di Desa Oben Kabupaten Kupang. Jurnal Pemerintahan (Vol. 2)*.
- Damayanti, E., Soeaidy, M.S., & Ribawanto, H. (2014). *Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3, Hal. 464-470.
- Khalil Gibran, A., Jaddang, S., & Muh Ardiansyah, Dan. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Jangka. *Mei 2021 Embiss*, 1(3), 230–249. Retrieved From <https://Embiss.Com/Index.Php/Embissat:Https://Embiss.Com/Index.Php/Embiss/Index>.
- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 245. Doi:10.21143/Jhp.Vol50.No1.2493
- Julian Par, M. M., Fahreza, G., Sulihingtyas Nurhanani, D., Alberth Doko, J., Rizal Maldini, M., Nur Wulandari, R., ... Tinggi Pariwisata Nhi Bandung, S. (2022). *Perencanaan Pengembangan Kawasan Wisata Agri Di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Hotelier Journal Politeknik Indonusa Surakarta (Vol. 8)*.

- Manalu, M., Thamrin Nasution, H., & Nasution, I. (N.D.). *Capacity Development Of Village Government Apparatus In Aek Korsik Village*. Retrieved From [Http://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Perspektif](http://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Perspektif) 7 (2) (2018): 55 – 59.
- Krisjuyani, S., Oevang Oeray No, J. Y., & Kota Sintang Kalimantan Barat, B. (N.D.). *Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa*.
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 451. Doi:10.30651/Aks.V6i3.12963
- Martina, Y., Dosen, M., Fakultas, T., Universitas, H., Bumi, S., & Jurai, R. (N.D.). *Implementasi Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Noor, M., Firdaus, M. R., & Yopiannor, Z. (2019). *Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Sebagai Agenda Utama Optimasi Pengelolaan Desa Menuju Kemandirian (Studi Kasus Desa Maipe Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur)* (Vol. 3). Retrieved From [Http://Jurnal.Stiatabalong.Ac.Id](http://Jurnal.Stiatabalong.Ac.Id)
- Irawati, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah kajian tentang Otonomi Desa). *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)*, Vol.2 No.2 Juli 2021.
- Prabawati, H., & Putri, J. (2013). *Faktor-Faktor Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata. Teknik Pwk* (Vol. 2).
- Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2020. (N.D.).
- Senen, J., & Faks, T. (N.D.). *Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus Capacity Forces Village Village In The Implementation Of Government In The District Kudus* (Vol. 314). Retrieved From [Http://Kejobongkec.Blogspot.Com/2011/10/Kapasitas-](http://Kejobongkec.Blogspot.Com/2011/10/Kapasitas-)
- Setiawan, A., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2024). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Academia Praja*, 7(1), 15–27. Doi:10.36859/Jap.V7i1.1814
- Sopyan, M., Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2024). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pasir Bentang Di Desa Sukannah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* (Vol. 2). Retrieved From [Https://Jurnal.Tiga-Mutiara.Com/Index.Php/Jimi/Index](https://Jurnal.Tiga-Mutiara.Com/Index.Php/Jimi/Index)

- Sulismadi, W., & Muslimin. (2017). *Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) Menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing* (Vol. 5). Retrieved From [Http://Journal.Umpo.Ac.Id/Index.Php/Aristo/Aristo@Umpo.Ac.Id](http://Journal.Umpo.Ac.Id/Index.Php/Aristo/Aristo@Umpo.Ac.Id)
- Sumaryana, A., Muhafidin, D., & Suprayogi Sugandi, Y. (2019). Kapasitas Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Desa: Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan Oleh. Retrieved From [Http://Www.Kemdesa.Id/](http://Www.Kemdesa.Id/),
- Wahyudi, A., & Yahya, K. (N.D.). *Pengembangan Agrowisata Desa Mulyosari Di Tengah Kehidupan Masyarakat Menuju Desa Mandiri Mulyosari Village Agro-Tourism Development In The Middle Of Community Life Towards Independent Village* (Vol. Xiv).
- Wanda Febrian, A., Nur Damayanti, A., Angraini, G., Fitriani Pamugkas, R., Afrelia, S., Carissa Andyko, M., ... Negeri Banyuwangi, P. (N.D.). Analisis Keberhasilan Kebijakan Smart Kampung Terhadap Pengembangan Desa Wisata Kemiren (Analysis Success Of The Smart Village Policy On The Development Kemiren Tourist Village). *Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessibility*, 4. Doi:10.36417/Jpp.V4i2.608
- Wardani, A. K., Riyadi, S., Kunci, K., Desa, P., Budaya, W., Lokal, K., & Desa, A. (N.D.). Analisis Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Budaya Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 6(4).
- Warisi, D., Trisno Aji, W., & Aprilia, L. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Desa Pasca Covid-19 (Studi Pada Wisata Dusun Tawun Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat) The Role Of Village Government In Developing Post-Covid-19 Village Tourism Potential (Study On Tawun Hamlet Tourism, West Sekotong Village, Sekotong District, West Lombok Regency), 2(1), 229–240. Doi:10.54066/Jkb.V2i1.1639